BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Informasi kios *3 in 1* di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri Kota Bandung, maka penulis mengemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses komunikasi yang berlangsung dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung, antara lain melalui transmisi atau penyampaian informasi. Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh BBPLKDN Bandung melalui Sistem Informasi Kios *3 in 1*, dimana seluruh aparatur dalam pemberian pelayanan mengenai pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja melalui Sistem Informasi kios *3 in 1* mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat tercapainya visi dan misi BBPLKDN sebagai Unit Pelaksana Teknis mengenai pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja.
2. Sumber daya yang dapat menentukan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung, antara lain sumber daya manusia. Sumber daya manusia di BBPLKDN Bandung sebagian besar dapat menguasai komputerisasi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Sistem Informasi Kios *3 in 1*. Sumber daya peralatan yang diperlukan sudah memadai berupa ruangan kios *3 in1* yang didalamnya

berisi 10 unit komputer yang telah terkoneksi oleh internet dan diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan informasi pelatihan, sertifikasi maupun penempatan kerja melalui bursa kerja tanpa di pungut biaya. Ruangan kios *3 in 1* tersebut telah terkoneksi dengan internet sehingga pengunjung dapat mempergunakan website kios *3 in 1* yaitu http://www.kios3in1.net untuk mendapatkan informasi mengenai pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja.

3. Disposisi atau sikap pelaksana implementasi kebijakan Sistem Informasi kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung sudah dikatakan baik dan dapat dilihat dari: pemahaman dan pendalaman aparatur BBPLKDN Bandung dalam hal ini *Customer Service Officer* (CSO) BBPLKDN Bandung yang tinggi dalam melayani masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai kios *3 in 1*, menunjang terlaksananya implementasi Sistem Informasi kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung.
4. Struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung sudah berjalan dengan baik, karena fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab terjadi dan sesuai dengan bagiannya masing-masing akan memperlancar keberhasilan pelaksanaan Sistem Informasi Kios *3 in 1* dalam mewujudkan visi BBPLKDN Bandung. Proses *Standard Operating Prosedure* (SOP) merupakan pedoman yang digunakan aparatur BBPLKDN Bandung untuk menunjang terlaksananya implementasi kebijakan Sistem Informasi Kios *3 in 1* di BBPLKDN bandung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis kemukakan, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan oleh Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri (BBPLKDN) Bandung dalam pelaksanaan Sistem Informasi Kios *3 in 1*. Saran-saran tersebut antara lain :

1. BBPLKDN Bandung sebaiknya dalam proses penyampaian informasi mengenai kios *3 in 1* bukan hanya memasang spanduk di area BBPLKDN Bandung saja sebaiknya spanduk yang berhubungan dengan bursa kerja sudah harus di buat perencanaan yaitu dipasang di area sekolah-sekolah, universitas-universitas, tempat-tempat umum, kawasan jalan protokoler agar informasi tersebut sampai kepada masyarakat.
2. Sumber daya yang ada di BBPLKDN Bandung harus dilaksanakan secara maksimal, terutama bagi aparat yang ditempatkan di kios *3 in 1* sebaiknya diberikan pelatihan *intens* dan berkala agar benar-benar memahami sistem kerja kios *3 in 1*. Begitu juga dengan sumber daya peralatan berupa komputer sebaiknya apabila ada komputer yang tidak dapat digunakan lagi segera diganti dengan komputer yang layak untuk kenyamanan penggunaan komputer bagi masyarakat yang datang ke kios *3 in 1.*
3. Sikap para aparaturnya harus lebih diperbaiki dan harus meningkatkan pemahaman dan pendalaman terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang

diberikan kepada BBPLKDN. Terkait hal tersebut Kepala BBPLKDN Bandung sebaiknya selalu memonitoring aparat atau anak buahnya yang memiliki kinerja baik untuk diberikan *reward* atau penghargaan atas integritas pegawai yang berprestasi.

4. Struktur Birokrasi di BBPLKDN Bandung harus lebih ditingkatkan, agar tidak terjadi struktur birokrasi yang menyimpang dan meningkatkan proses *Standars Operating Prosedure* (SOP), SOP tidak hanya dijadikan sebagai prosedur tertulis saja tetapi SOP harus dijadikan acuan untuk kegiatan teknis di lapangan dan terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung. Sebaiknya mulai dibuat aturan teknis dari BBPLKDN mengenai implementasi kios *3 in 1* untuk memberi kejelasan mengenai *blue print* kios *3 in 1* sehingga apabila ada kendala-kendala di lapangan dapat segera ditemukan solusi tanpa menunggu lama perintah dari atas yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.